**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Politik Luar Negeri suatu negara selalu mengarah kepada promosi kepentingan nasional suatu negara termasuk juga negara Amerika Serikat. Tindakan-tindakan Amerika Serikat ini tercermin dari serangkaian kebijakan luar negeri Amerika Serikat  terkait kompetisi ekonomi, memperkuat pertahanan di perbatasan negara-negara, mewujudkan perdamaian, kebebasan, dan upaya perluasan ideologi demokrasi. Namun pada dasarnya politik luar negeri  tidak pernah pernah bersifat tetap, politik luar negeri harus merespon dan merumuskan kebijakan sesuai dengan kepentingan nasional dan peluang dalam hubungan internasional.(Harenda, n.d.)

Politik luar negeri Amerika Serikat mengalami perubahan dari politik Isolasionis menuju politik aktifis sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat domestic maupun di tingkat global. Politik isolasionis merupakan pilihan para pengambil keputusan di Amerika sepanjang abad ke 18 dan 19 merupakan faktor eksternal yang ikut mendorong tumbuhnya sikap isolasionis tersebut. (Bambang Cipto, 2003)

Menilik kebelakang tentang sejarah politik luar negeri AS akan mempermudah penulis dalam mencari data laporan terkait kebijakan politik luar negeri AS di Venezuela. Karena akan ada relevansinya dengan kebijakan politik luar negeri AS pada abad ke 21 ini.

Kebijakan AS di Amerika Latin dapat dilihat dari faktor geopolitik, kedekatan geografis, ukuran dan populasi yang pada akhirnya membuat Amerika Latin menjadi region penting bagi AS. Amerika Tengah dan Selatan membentuk daratan lebih dari dua kali ukuran Amerika Serikat. Berbeda dengan Asia, Amerika Latin memiliki Balance antara luas tanah dan populasi dan juga sumber daya alam. Amerika Latin adalah salah satu pasar terbesar untuk ekspor AS dan sumber utama dari banyak bahan baku yang diimpor oleh Amerika Serikat. Amerika Latin adalah penerima investasi ekuitas terbesar bagi AS, terutama Venezuela.

Amerika Serikat (AS) menerapkan standar ganda dalam politik luar negerinya di Amerika Latin. Dasar kebijakan intervensi AS yang pertama adalah Doktrin Monroe pada 1823, yakni bahwa AS telah menetapan Amerika Latin sebagai halaman belakangnya *(backyard)* yang merupakan bagian dari dunia barat *(Western Hemisphere)*. Doktrin ini dimaksudkan untuk mencegah intervensi negara-negara Eropa ke wilayah Amerika Latin, namun di sisi lain AS memiliki hal intervensi terhadap negara-negara Amerika Latin dengan cara yang bervariasi sepanjang abad XIX dana awal abad XX. Artinya, wilayah Amerika Latin dilindungi secara ketat untuk mencegah pengaruh lain yang merugikan kepentingan AS.

Dasar yang lain kebijakan intervensi AS adalah Roosevelt Corollary yang merupakan pidato Presiden Roosevelt tahun 1904. Roosevelt Corollary ini memperkuat Doktrin Monroe. Esensinya adalah AS mendeklarasikan diri sendiri sebagai polisi internasional sehingga menyediakan justifikasi unilateral untuk menignkatkan intervensi ke negara-negara Amerika Latin. Doktrin Monroe bersama dengan Roosevelt Corollary ini juga menjadi landasan kebijakan intervensionis AS di Dunia ke Tiga. Doktrin-doktrin intervensionis AS berkembang dengan mucnulnya Doktrin Johnson, Doktrin Eisenshower, Doktrin Reagan, sehingga intervensi menjadi tindakan legal yang diperbolehkan bagi AS.(Ferdiansyah, 2011)

Politik isolasionis AS dimulai sejak periode antara tahun 1800 hingga 1945, Kongres dan Presiden Amerika mengambil sikap hati hati dalam menjalankan politi luar negerinya. Konges khususnya sangat membatasi kebijakan PLN AS ketika elit politik Amerika generasi Amerika generasi pertama pada umumnya kurang dapat menerima budaya peperangan yang terus berlangsung antara-antara negara Eropa.(Bambang Cipto, 2003)

Haluan dasar politik luar negeri yang diletakkan oleh para Bapak Pendiri Amerika ini bahkan kemudian berkembang menjadi wacana politik yang sangat kuat melandasi Munculnya *Doktrin Monroe* pada tahun 1823. Presiden Monroe menyatakan dalam doktrinnya bahwa hanya dengan mengisolir diri dari Amerika akan terhindar dari bencana politik yang disebabkan sebagaimana terjadi di Eropa. Dengan doktrin tersebut, Amerika menegaskan dirinya untuk tidak menjadi anggota blok manapun atau dewasa ini lebih popular dengan istilah non-blok.(Bambang Cipto, 2003b)

Pasca Perang Dunia II merupakan titik balik arah perubahan kebijakan politik luar negeri AS dari isolasionis menjadi lebih agresif. Perang dunia II menyisakan dua kekuatan hegemoni global anatar AS dan Uni Soviet, maka pada peta politik global pun mengerucut menjadi dua kubu kekuatan atau biasa yang disebut bipolar yang sebelumnya multipolar.

Selanjutnya pada masa perang dingin, kebijakan politik luar negeri AS mengalami perubahan menjadi kebijakan intervensionis. Sejarah menunjukkan, bahwa pada masa Perang Dingin, kebijakan intervensionis ini seringkali dipakai AS sebagai pilihan instrument politik luar negerinya untuk mengadakan perubahan pemerintahan di berbagai negara. Dalam konteks bipolaritas Perang Dingin, keterlibatan AS dalam proses perubahan rezim di negara lain dapat dijelaskan dalam kerangka politik pembendungan *(containment)* yaitu sebagai usaha AS untuk menangkal persebaran pengaruh ideologi dana kepentingan Uni Soviet. Hal ini terlihat dari fakta bahwa seluruh rezim yang berusaha dilemahkan atau bahkan digulingkan AS selama periode Perang Dingin adalah rezim yang berbasiskan sosialisme dan memiliki hubungan yang erat dengan blok Uni Soviet.

Kekuatan hegemoni AS pasca Perang Dingin semakin tidak terbendung. Fokus kebijakan luar negeri AS pun beralih fokusnya dari perebutan pengaruh ideologi dengan Uni Soviet sekarang lebih fokus terhadap isu HAM, demokrasi, terorisme. Kawasan yang syarat akan konflik politik sekaligus salah satu pemilik cadangan minyak terbesar di dunia ini memicu agresivitas AS dan kebijakan luar negerinya terhadap Venezuela.

Selanjutnya penulis akan memaparkan secara singkat sejarah kebijakan luar negeri AS di Venezuela serta hubungan kerjasama kedua negara.

Kebijakan AS terhadap Venezuela dari tahun-tahun terakhir pemerintahan Obama melalui 15 bulan pertama Administrasi Trump sebagian besar telah mengikuti visi yang konsisten dan pendekatan taktis yang berkembang dalam menanggapi keadaan yang berubah. Keadaan ini termasuk percepatan konsolidasi otoriter oleh pemerintah Maduro termasuk *quashing* Presiden Maduro tentang referendum recall pada tahun 2016, tentara melakukan kekerasan nya pada protes besar-besaran pada musim semi 2017.(Revolusi, Trump, & Camilleri, 2017)

Kebijakan luar negeri AS, yang tidak selalu di sisi kanan dari sejarah di Amerika Latin, dalam kasus Venezuela benar-benar didefinisikan sebagai pelestarian demokrasi sebagai tujuan menyeluruhnya. Berturut-turut pemerintah memahami bahwa memajukan kepentingan-kepentingan AS - termasuk melindungi norma-norma demokrasi setengah bulat, menjaga stabilitas dan keamanan regional, dan mencegah bencana kemanusiaan dengan efek *spillover* signifikan - yang terbaik dicapai melalui kebijakan ditujukan untuk memulihkan lembaga-lembaga demokrasi dan aturan hukum di Venezuela. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang paling keras dalam membela hak-hak asasi warga negara Venezuela. Apa pun motifnya, Pemerintahan Trump tetap retoris berkomitmen untuk mendemokratisasi Venezuela.(Revolusi et al., 2017)

Dalam dua tahun terakhir masa pemerinatahan Obama, kantor Administrasi Obama melakukan pendekatan multi-track ke Venezuela yang termasuk sanksi individu, diplomasi multilateral (terutama melalui OAS), dukungan untuk negosiasi antara pemerintah Venezuela dan oposisi politik, dan advokasi publik untuk hak asasi manusia dan konstitusional agar termasuk referendum recall.(Revolusi et al., 2017)

Secara teori, berbagai trek pendekatan tim yang saling menguatkan, memaksimalkan tekanan unilateral dan multilateral pada pemerintah Venezuela akan memperkuat kemampuan oposisi untuk mencapai konsesi hak asasi manusia dan demokrasi dalam negosiasi. Dalam prakteknya, pendekatan *multi-track* memungkinkan Administrasi untuk membuat perbedaan kebijakan, dan menyediakan perlindungan bagi para aktor dalam Administrasi untuk fokus pada jalan tertentu yang mereka sukai. Negosiasi dengan pemerintah Maduro dimanfaatkan hanya untuk mengulur waktu, dan menyediakan ruang untuk dialog naas yang digunakan untuk meningkatkan tekanan pada rezim Nicolas Maduro. Skenario yang lebih mungkin adalah bahwa Administrasi Trump akan melakukan pendekatan *double down* pada saat ini, dengan semakin gencarnya melakukan penurunan rezim dan perluasan sanksi keuangan terhadap Venezuela.(Revolusi et al., 2017)

Trump dan Administrasi nya telah mengambil sejumlah langkah untuk menekan pemerintah Venezuela, Nicolás Maduro, termasuk sanksi yang diperluas. Sejauh ini, bagaimanapun, tindakan ini telah gagal untuk mencapai tujuan mereka untuk membuat Venezuela ke lintasan demokratis. Venezuela telah tumbuh semakin terisolasi secara internasional, dan menjadi lebih otoriter dan represif. Upaya intervensi lainnya yang dilakukan AS dalam situasi krisis Venezuela yaitu akan mempertimbangkan opsi militer untuk menekan pemerintahan otokratik Nicolas Maduro. Selain itu, AS menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Venezuela semua aset Maduro yang masuk ke dalam yurisdiksi AS akan dibekukan. Selain itu, AS juga melarang semua warganya berurusan soal apapun dengan Maduro. Juru bicara Departemen Keuangan AS menyatakan bahwa sanksi tersebut melarang siapapun yang merupakan warga AS untuk melakukan hubungan bisnis dengan orang yang dikenakan sanksi. Selain itu, orang yang dikenakan sanksi juga dilarang mengakses sistem keuangan dan komersial AS. Keputusan sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Maduro dipandang tidak akan ada bandingannya dengan sanksi ekonomi yang juga akan dijatuhkan kepada Venezuela. Sanksi ini menyasar kepada industri minyak negara itu. Pasalnya, minyak adalah satu-satunya sumber pendapatan Venezuela. Dalam hal ini, pemerintah AS akan memperitmbangkan sanksi ini lebih lanjut.(Revolusi et al., 2017)

Intervensi lainnya yg dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela saat ini yaitu mendukung naiknya Juan Guaido sebagai presiden sementara Venezela selama masa transisi pemerintahan dan menyebut Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah. Selain itu, AS mengajak militer dan pasukan keamanan lainnya untuk memihak Guaido. Namun, Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino merespon dengan menegaskan militer tidak akan menanggalkan sumpah setia mereka kepada Maduro. Keberpihakan AS terhadap oposisi Venezuela ini dapat memicu terjadinya perang saudara dan kemungkinan buruk lainnya di kemudian hari. Jika nantinya konflik sipil pecah di Venezuela, maka akan banyak darah masyarakat yang tertumpah. Intervensi AS ini merupakan bentuk intervensi internal suatu negara yang akan berakibat fatal terhadap pemerintahan Venezuela.(Revolusi et al., 2017)

Agresivitas AS terhadap negara-negara Amerika Latin, termasuk Venezuela dipertegas oleh Bush Jr. dalam pidato kampanyenya, pada tanggal 26 Agustus 2000, di depan warga Kuba-Amerika di International University Florida, Miami. Bush mendeklarasikan Amerika Latin sebagai kepentingan vital AS, dan ia menyiratkan intervensi militer di Timur Tengah dan Balkan dapat terulang di wilayah yang disebut *Western Hemisphere* ini. Salah satu negara Amerika Latin yang kini menjadi perhatian AS adalah Venezuela, yaitu sebuah negara kaya minyak yang kritis terhadap AS.(Ferdiansyah, 2011)

Dalam studi Hubungan Internasional, terdapat elemen yang berkontribusi dalam perkembangannya. Elemen tersebut antara lain adalah *actor, interest, dan power*. Ini merupakan elemen utama yang dipakai oleh kaum realis dalam bukunya *Politics Among Nations*, Hans.J.Morgenthau mengatakan ia menulis bahwa realisme politik di dalam studi Hubungan Internasional termanifestasi dalam konsep *interest* dan *power*. Dalam bukunya, ia mengutip :

**“The statesman must think in terms of the national interest, conceived as power among other powers. The popular mind, unaware of the fine distinctions of the statesman’s thinking, reasons more often than not in the simple moralistic and legalistic terms of absolute good and absolute evil.”**

Kepentingan nasional merupakan landasan utama sikap agresif AS terhadap Venezeula. Melawan intervensi dan hegemoni AS merupakan agenda besar bagi Venezuela, terlebih dalam menghentikan upaya kudeta AS terhadap pemerintahan Venezuela yang mengalami krisis hingga saat ini.

Venezuela merupakan negara yang berada di ujung utara Amerika Selatan. Penemuan minyak mentah pada tahun 1913 membuat Venezuela menjadi negara penghasil minyak dengan sumbangan cadangan devisa sebagian berasal dari minyak. Pada tahun 1920, produksi minyak kebanyakan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asing, terutama AS. Seiring berjalannya waktu awal tahun 1970-an dan lebih tepatnya tahun 1976 program nasionalisasi minyak di resmikan. Peningkatan dan volatilitas lebih besar dari harga minyak tahun 1974 menyebabkan pendapatan tidak terduga dari negara Venezuela. Peningkatan ini berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian Venezuela yang terus mengalami kenaikan dari tahun 1960-1970 an, namun dekade setelah itu perekonomian Venezuela terus menurun.(*KrisisNegaraVenezuela*, n.d.)

Secara garis besar negara Venezuela terus mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga tahun 1970, namun semua itu berubah pada tahun setelahnya diakibatkan adanya gangguan pada perekonomian Venezuela. Elemen penting dari dalam pertumbuhan yang relative rendah adalah proses nasionalisasi industri minyak. Perburukan ekonomi tidak hanya karna adanya factor penurunan harga minyak saja, namun juga faktor politik.(*KrisisNegaraVenezuela*, n.d.)

Ketidakstabilan perekonomian Venezuela juga diperburuk dengan pergolakan krisis politik di bawah kekuasaan otoriter Presiden Nicolas Maduro. Rezim Maduro dituduh telah melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendalam di Venezuela. Maduro juga memiliki berbagai kebijakan kontroversional, seperti penggunaan pengadilan dan pasukan keamanan untuk menindas dan membagai oposisi politik. keterpurukan politik dan ekonomi di Venezuela menandakan krisis di negara Venezuela yang ditandai dengan ketidakstabilan inflasi, kekurangan barang konsumsi, dan memperburuknya kondisi kehidupan.*(KrisisNegaraVenezuela, n.d.)*

Krisis di Venezuela merupakan masalah bagi negara dan wilayah yang tidak dilengkapi hukum internasional maupun lembaga-lembaga multilateral yang baik untuk menanganinya. Sulit untuk mengantisipasi kapan atau bagaimana rezim Maduro di Venezuela akan runtuh, namun jelas bahwa saat ini problematika yang terjadi adalah krisis politik yang dampaknya berujung pada krisis ekonomi akibat dari tidak stabilnya sistem politik pemerintahan serta kebijakan domestik di Venezuela. Sehubungan dengan dinamika politik, manuver di adopsi oleh rezim Maduro telah menunjukkan tekadnya untuk mempertahankan kekuasaan pada biaya apapun dan keengganan untuk mengejar kompromi politik yang tulus atau solusi konstitusional yang dapat mengakibatkan kerugian kekuasaan.(E. R. Ellis, 2017)

Berbagai fenomena geografi yang terjadi di muka bumi tentu memiliki hubungan atau keterkaitan antar komponen. Begitupula dengan hubungan antara kondisi fisik wilayah Venezuela dengan kondisi social dan ekonomi di wilayah tersebut. Salah satu hal yang dapat dianalisis adalah, bahwa kondisi fisik memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi penduduk. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi negara Venezuela yang memiliki kemampuan menghasilkan minyak bumi, tentulah dimanfaatkan oleh penduduk sebagai salah satu mata pencahariannya. Oleh karena itulah, maka penduduk Venezuela meskipun tergolong negara berkembang namun telah dapat mencukupi kebutuhan hidup penduduknya dengan memanfaatkan sumberdaya alam tersebut.

Penduduk negara Venezuela merupakan penduduk yang memiliki tingkat demokratis atau peran serta terhadap pemerintahan yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme penduduk dalam melakukan pemilihan presiden. Sumber yang diperoleh menyatakan sebagai berikut :

**“Venezuela merupakan salah satu negara demokrasi yang mempunyai banyak partai politik dengan jumlah partai politik yang memiliki massa dalam jumlah yang besar. Perpolitikan Venezuela dapat dikatakan termasuk salah satu yang unik, ia hampir sama dengan negara-negara Amerika Latin yang lain dimana dalam pemerintahan perlu dilakukan suatu pemberontakan untuk menggantikan rezim yang sedang berkuasa, baik sejak pada kolonialisme Spanyol hingga masa pemerintahan oleh orang-orang lokal. Namun ia juga dapat dikatakan berbeda dengan perpolitikan di negara-negara lain di Amerika Latin, dimana ketika pada pertengahan abad ke-20 pemerintahan di hampir semua negara Amerika Latin didominasi oleh kekuatan militer, di Venezuela justru proses demokrasi tengah berlangsung.”**(*VENEZUELA\_2*, n.d.)

Berdasarkan kutipan tersebut, setidaknya penduduk Venezuela sudah memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan kondisi negara yang dominan datar dan hanya beberapa bagian yang bergunung tidak menyurutkan semangat berpolitik penduduk Venezuela. Sebenarnya, topografi juga berpengaruh terhadap kehidupan berpolitik. Hal tersebut umumnya karena penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan tidak memiliki tingkat partisipasi yang tinggi. Namun tidak berlaku demikian bagi wilayah Venezuela.(*VENEZUELA\_2*, n.d.)

Kebijakan politk luar negeri Venezuela mulai berubah sejak berakhirnya pemerintahan [Carlos Andrés Pérez](https://id.wikipedia.org/wiki/Carlos_Andr%C3%A9s_P%C3%A9rez) dan digantikan oleh Rafael Hugo Chaves Frias pada tahun 1998. Semenjak terpilihnya Rafael Hugo Chaves Frias pada pemilihan presiden terbuka tahun 1998, Politik luar negeri Venezuela bisa dikatakan berubah total dari pemerintahan-pemerintahan Venezuela sebelumnya. Selama pemerintahannya, Chaves selalu mengkritik dan menolak cara-cara neoliberalisme yang dianggap merugikan negaranya, Chaves pada pidato-pidatonya, dengan tegas berpendapat bahwa krisis puncak di balik 1989 yang terjadi pada negaranya di sebabkan oleh Amerika Serikat. AS untuk pertama kali berupaya masuk ke Venezuela berbarengan dengan krisi yang terjadi pada tahun 1980-an, kondisi ini dimanfaatkan oleh AS untuk memberikan pinjaman melalui IMF *(International Monetary Fund)*, dengan bantuan luar negeri. Dengan demikian Venezuela harus membuka diri terhadap pasar global dengan tujuan untuk mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan bisa membayarkan utang luar negerinya. Hal ini merupakan sebuah strategi oleh AS yang dilakukan secara kolektif, yang dikenal dengan proyek neoliberalisme (Shah, 2013) . Dimana Amerika Serikat pada saat itu dianggap mencoba memanuver penuh pemerintahan Venezuela dengan mendukung para kapitalis melalui kebijakan SAP *(Structural Adjusment Program)* yang di sepakati antara pemerintah sebelummnya bersama IMF dengan memberikan hak bagi kaum kapitalis untuk memprivatisasi perusahaan-perusahaan penting di Venezuela.

Venezuela mengalami krisis yang bekepanjangan hingga saat ini, bahkan krisis yang terjadi saat ini jauh lebih buruk dari sebelumnya. Presiden Venezuela saat ini, Nicolas Maduro memiliki pekerjaan yang berat dalam mengatasi krisis politik yang berujung kepada krisis ekonomi sehingga terjadinya hyper-inflasi dan buruknya kondisi kehidupan di negara ini. Sebelum Maduro terpilih menjadi presiden Venezuela, dalam kampanyenya dia berjanji akan memenuhi revolusi sosialis dari pemerintahannya sebelumnya yang dibiyai dari uang hasil penjualan minyak, yang memberikan program-program pendidikan, kesehatan, dan pangan gratis kepada kaum miskin. Pernyataan-pernyataan yang dikemukakan Maduro tentu mengundang berbagai macam respon, termasuk dari kelompok oposisi. Dimana kelompok oposisi merupakan warga kelas atas dan kelas menengah, mengaku “cukup menderita” terkait kebijakan sosialis yang terlalu memihak rakyat miskin.

Pasca pengumuman hasil pemilu, demonstrasi-demonstrasi berskala paling besar yang menolak hasil pemilu Presiden tahun 2013, demonstrasi ini telah berlangsung selama sebulan di seluruh jalan-jalan ibu kota Caracas dan banyak kota besar di Venezuela. Venezuela mengahadapi masalah serius. Meskipun negara ini memiliki industri minyak bernilai miliaran dolar, tetap saja kondisi perekonomian dan kehidupan Venezuela berada dalam baying-bayang keruntuhan. Inflasi merajalela dan mata uang sangat tidak stabil. Kekacauan yang terjadi di Venezuela saat ini berawal dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengembalikan status ekonomi dari kemungkinan resesi. Tingkat popularitas pemerintah Maduro yang terus menurun akibat dari ketidakmampuannya untuk memperbaiki situasi politik dan ekonomi di Venezuela saat ini menjadi momentum yang tepat bagi ‘oposisi’ untuk memperoleh dukungan rakyat. (Maduro, 2013)

Ditengah krisis ekonomi yang amat parah, Venezuela pun diguncang unjuk rasa dan protes dari rakyat yang mendukung kelompok oposisi di parlemen di bawah pimpinan Juan Guaido. Ribuan demonstran Venezuela memenuhi jalan-jalan menuduh Presiden Nicolas Maduro merebut kekuasaan dan mereka bergabung dengan gerakan oposisi yang bangkit kembali di negara itu. Mereka menuntut Maduro mundur dari jabatan selagi negara itu mengalami krisis ekonomi yang memaksa jutaan orang melarikan diri ke luar negeri atau menderita kelaparan. Kerumunan besar pengunjuk rasa berkumpul di Caracas melambaikan bendera dan meneriakkan “Mundurlah Maduro!” dalam demonstrasi terbesar, sejak terjadi gelombang kerusuhan yang menewaskan lebih dari 120 orang pada tahun 2017. (Maduro, 2013)

Guaido yang awal Januari lalu resmi dilantik sebagai ketua Majelis Nasional pada 23 Januari 2019 menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela dengan maksud untuk memimpin masa transisi pemerintahan sampai pemilihan berikutnya. Guaido menuduh Maduro telah merebut kekuasaan dan menuding terjadi kecurangan pada proses pemilu 2018. Kepresidenannya langsung diakui oleh beberapa negara asing.

Venezuela disebut sebagai negeri dengan ‘dua’ matahari, dimana adanya dwikepemimpinan di negara sosialis ini. Presiden Nicolas Maduro dan Juan Guaido masing-masing merasa paling berhak memimpin negara. Dalam hal ini banyak negara-negara besar yang menyorot dan mengamati kepemimpinan Maduro ini. Maduro di dukung oleh pemimpin negara-negara kawasan, seperti Meksiko, Bolivia, dan Kuba. Dukungan yang sama juga diperolehnya dari negara-negara besar, semisal Turki, Cina, dan Rusia. Moskow bahkan baru-baru ini memperingatkan AS agar tidak mencampuri urusan internal Venezuela. Sementara Guaido di dukung langsung leh Amerika Serikat dan tujuh negara Amerika Selatan yaitu seperti Brasil, Kosta Rika, Argentina, Peru, Kolombia, Ekuador, dan Cile. Demikian pula dengan Kanada, Spanyol, dan Inggris. Adapun Uni Eropa cenderung mengambil jalan tengah, yakni meminta segera digelarnya pemilu yang bebas dan dapat dipertanggungjawabkan di Venezuela. (Republika.co.id, 2019a)

Adanya dua politikus yang mengklaim kepresidenan kian mengancam stabilitas politik Venezuela. Tidak menutup kemungkinan, negeri itu berlarut-larut dalam krisis kepemimpinan. Masing-masing pihak sejauh ini berupaya menjungkalkan satu sama lain, antara lain, dengan menggalang koalisi sebesar-besarnya.(Republika.co.id, 2019a)

Semakin peliknya permasalahan dua kepemimpinan serta dampaknya terhadap stabilitas politik di Venezuela, maka penulis menaruh perhatian untuk menganalisis permasalahan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“PENGARUH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP KRISIS SISTEM POLITIK DI VENEZUELA”***

**1.2 Identifikasi Masalah**

Perjuangan Venezuela dalam melawan intervensi AS bersamaan dengan krisis politik yang sedang terjadi akan penulis sempitkan menjadi beberapa pertanyaan menurut prediksi dan analisis penulis. Maka berdasarkan penjabaran singkat mengenai upaya Venezuela dalam mengatasi krisis sistem politiknya serta peran kebijakan AS di Venezuela, identifikasi masalah yang akan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana arah dan tindakan strategi politik luar negeri Amerika Serikat memaknai krisis sistem politik di Venezuela?
2. Bagaimana tuntutan perubahan struktur sosial-politik masyarakat serta sikap politik luar negeri AS di Venezuela?
3. Bagaimana gerakan politik masyarakat menghadapi krisis sistem politik serta dukungan AS di Venezuela?
   1. **Pembatasan Masalah**

Mengingat cukup luasnya permasalahan krisis sistem politik di Venezuela yang sudah disampaikan penulis, maka penulis membatasi permasalahan hanya pada arah dan tindakan strategi kebijakan politik luar negeri AS di Venezuela di bidang sosial dan politik dan korelasinya dengan sikap AS di Venezuela dalam tuntutan perubahan gerakan politik terhadap instabilitas krisis sistem politik di Venezuela. Pembatasan masalah penting bagi karya penelitian agar tema masalah yang diangkat tidak meluas dan untuk menghindari pembiasan dalam menemukan solusi dari masalah yang diangkat.

* 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran umum di latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan diambil adalah :

Bagaimana tuntutan perubahan serta gerakan politik masyarakat menghadapi krisis sistem politik korelasinya dengan reaksi dan sikap politik luar negeri AS di Venezuela.

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui arah dan tindakan orientasi strategi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat memahami krisis sistem politik di Venezuela
2. Untuk mengetahui tuntutan perubahan terhadap krisis di Venezuela
3. Untuk mengetahui pertimbangan sosial politik terhadap instabilitas krisis sistem politik Venezuela korelasinya dengan sikap AS di Venezuela
   * 1. **Kegunaan Penelitian**
4. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam upaya memenuhi ujian sidang sarjana program S1 pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik Universitas Pasundan.
5. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan komperatif bagi penelitian yang sejenis, dan aspek-aspek yang belum terungkap di dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, baik bagi pembaca umum maupun penstudi Hubungan Internasional lainnya pada khususnya.
6. Hasil Penelitian ini dapat digunakan bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh lingkungan eksternal terhadap dinamika sistem politik di Venezuela
   * + 1. **Kegunaan praktis**
7. Bagi Mahasiswa

a) Menjadi media untuk melakukan studi secara lebih komprehensif mengenai disiplin ilmu Hubungan International khususnya dalam bidang sistem politik dan kepentingan nasional.

b) Menjadi media dan sumber utuk mengimplikasikan ilmu yang di peroleh di bangku kuliah kedalam suatu bentuk karya tulis ilmiah

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini di harapkan untuk memberikan sumbangan informasi data, fakta dan kebenaran mengenai fluktuasi sistem politik yang terjadi di Venezuela dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

**2.1 Literatur Review / Penelitian terdahulu**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan literatur *review* yang berkaitan dengan variabel bebas, variabel terikat dan korelasi antar kedua variabel tersebut. Dengan adanya literatur *review*, akan memudahkan penulisan karya ilmiah. Disamping itu, hal tersebut juga untuk menghindari adanya tindakan plagiarisme.

Pertama, skripsi oleh Ismail, program studi Hubungan Internasional Universitas Pasundan tahun 2012 yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Di Timur Tengah dan Implikasinya Bagi Gerakan Politik Perjuangan Etnis Kurdi”. Skripsi ini membahas tentang pasang surut perjuangan kemerdekaan etnis kurdi serta faktor yang menghambatnya, dikarenakan adanya intervensi AS yang menjadi faktor utama penyebab instabilitas keamanan di Timur Tengah. Berawal dari terjadinya *Arab Spring* yang di duga kuat hal tersebut diilhami oleh kepentingan AS dan negara-negara Barat untuk menumbangkan rezim otoriter yang tidak patuh terhadap aturan ‘main’ AS dan sekutunya di Timur Tengah. Referendum etnis Kurdi Irak merupakan titik awal di era modern ditengah *Arab Spring* yang masih berkecamuk di timur tengah. Stabilitas keamanan di Timur Tengah mengalami degradasi yang cukup signifikan akibat *Arab Spring*, ditambah perjuangan kemerdekaan etnis Kurdi Irak yang kian gencar akan menambah rentetan masalah yang panjang di Timur Tengah. Fakta bahwa wilayah kurdistan terdapat di beberapa negara, menjadi kendala utama bagi sebuah negara Kurdistan merdeka, serta tidak adanya dukungan internasional dalam usaha kemerdekaannya, terlebih pemerintah setempat termasuk Irak, Suriah, Iran dan Turki melakukan upaya menghentikan atau menghambat usaha kemerdekaan dalam bentuk apapun demi menjaga stabilitas keamanan di Timur Tengah.

Kedua, jurnal karya Benardy Ferdiansyah program studi Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah yang berjudul “Kebijakan Hugo Chavez Di Venezuela Dalam Melawan Hegemoni Amerika Serikat (2002-2005)”. Jurnal ini membahas tentang usaha Hugo Chavez untuk menyatukan negara-negara Amerika Latin agar menjadi kekuatan besar dalam memerangi kapitalisme, dikarenakan penderitaan rakyat akibat dari sebuah agenda neoliberal AS yang telah melumpuhkan ekonomi dan peningkatan kemiskinan secara drastis. Sehingga lahirlah konsep Revolusi Bolivarian yang dicetus oleh Hugo Chavez yang berarti anti neoliberalisasi, yang membuat kedua negara menjadi renggang dan semakin renggang hingga saat ini.

Ketiga, jurnal internasional karya Dr. R. Ivan Ellis yang berjudul “The Collapse of Venezuela and Its Impact On The Region”. Jurnal ini membahas tentang situasi, faktor dan potensi keruntuhan Venezuela akibat krisis berkepanjangan, diantaranya krisis politik, sosial, keamanan dan kemanusiaan yang terjadi di Venezuela hingga saat ini. Selain itu jurnal ini juga menganalisis potensi skenario Venezuela selanjutnya serta implikasi bagi negara tetangga Venezuela.

Jika dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan judul “Pengaruh Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Krisis Sistem Politik di Venezuela”, maka literatur *review* berupa skripsi dan jurnal yang telah dipaparkan sebelumnya tentu memiliki perbedaan. Hal tersebut terurai dalam tabel perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

**Perbandingan Penelitian**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | Judul Penelitian | Isi Penelitian | Perbandingan dengan penelitian penulis |
| 1. | “Pengaruh Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Di Timur Tengah dan Implikasinya Bagi Gerakan Politik Perjuangan Etnis Kurdi” | Membahas tentang proses gerakan politik etnis Kurdi dalam usaha memperjuangkan kemerdekaannya, tantangan dan faktor-faktor yang menghambat etnis Kurdi dalam memperoleh hak politiknya. Serta pengaruh implementasi kebijakan politik luar negeri AS di Timur Tengah terhadap gerakan politik etnis Kurdi. | Menguraikan tentang krisis sistem politik yang terjadi di Venezuela dan seberapa besar pengaruh kebijakan luar negeri AS dalam proses politik di Venezuela. |
| 2. | “Kebijakan Hugo Chavez Di Venezuela Dalam Melawan Hegemoni Amerika Serikat (2002-2005)” | memaparkan tentang bagaimana usaha Hugo Chavez untuk menyatukan negara-negara Amerika Latin agar menjadi kekuatan besar dalam memerangi kapitalisme, dikarenakan penderitaan rakyat akibat dari sebuah agenda neoliberal AS yang telah melumpuhkan ekonomi dan peningkatan kemiskinan Venezuela secara drastis. | Memaparkan tentang bagaimana usaha pemerintah Venezuela di bawah pimpinan Nicolas Maduro dalam mengatasi krisis sistem politik hingga memerangi kudeta yang dilakukan oleh pemerintahan oposisi Maduro. |
| 3. | “The Collapse of Venezuela and Its Impact On The Region” | menjelaskan tentang situasi, faktor, potensi keruntuhan Venezuela dan konflik yang ditimbulkan akibat krisis berkepanjangan, diantaranya krisis politik, sosial, keamanan dan kemanusiaan yang terjadi di Venezuela hingga saat ini. Selain itu jurnal ini juga menganalisis potensi skenario Venezuela selanjutnya serta implikasi bagi negara tetangga Venezuela. | Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya krisis sistem politik di Venezuela serta dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Baik dari aspek sosial maupun keamanan. |

Dengan merujuk pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa keempat penelitian yang berupa skripsi dan jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Pada skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebijakan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Di Timur Tengah dan Implikasinya Bagi Gerakan Politik Perjuangan Etnis Kurdi” lebih menitikberatkan kepada proses gerakan politik etnis Kurdi dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan dan memperoleh hak politiknya. Memfokuskan kepada usaha etnis Kurdi untuk mendirikan negara Kurdistan yang diimpikannya.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “Kebijakan Hugo Chavez Di Venezuela Dalam Melawan Hegemoni Amerika Serikat (2002-2005)” memfokuskan kepada perlawanan Hugo Chavez terhadap hegemoni AS, memerangi kapitalisme dan neoliberalisasi di Venezuela yang telah melumpuhkan ekonomi dan peningkatan kemiskinan secara drastis.

Selanjutnya penelitian yang berjudul “The Collapse of Venezuela and Its Impact On The Region” lebih mentikberatkan kepada konflik yang ditimbulkan akibat krisis berkepanjangan, diantaranya krisis politik, sosial, keamanan dan kemanusiaan yang terjadi di Venezuela hingga saat ini.

Terakhir, penelitian yang berjudul “Venezuela In Crisis” memfokuskan kepada sejarah penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Venezuela hingga hari ini, krisis sistem politik yang bermula sejak rezim Carlos Andrez Perez hingga pada rezim Nicolas Maduro saat ini.

**2.2 Kerangka Teoritis**

Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu kerja sama *(cooperation)*, persaingan *(competition)*, dan konflik *(conflict)* antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya. Menurut **K.J Holsti**, seorang ahli ilmu Hubungan Internasional dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis” adalah sebagai berikut:

**“Hubungan Internasional adalah kegiatan-kegiatan atau semua bentuk interaksi antar anggota suatu masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya, apakah interaksi tersebut disponsori atau tidak oleh pemerintahnya. Yang dimaksud oleh masyarakat dalam hal ini adalah suatu negara yang mempunyai batas-batas wilayah dan pemerintahannya serta kedaulatan di masing-masing wilayahnya merupakan suatu usaha untuk mencapai tujuan nasional setiap bangsa atau negara yang melalui interaksi dengan negara lain dimana interaksi tersebut dapat berbentuk hubungan antar pemerintah maupun antar negara. Hubungan diplomatik, persekutuan, aliansi, peperangan, negosiasi, ancaman kekuatan militer, budaya, ekonomi, ikatan ras dan etnik, dan hubungan antar manusia yang tinggal di negara berbeda”** (Holsti, 1987)

Seperti yang dikemukakan para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pola interaksi daalam hubungan internasional itu bersifat kerjasama, kompetisis, dan konfliktual. Terciptanya pola interaksi dalam hubungan internasional tersebut merupakan hasil dari adanya kepentingan nasional masing-masing negara yang kemudian dirumuskan menjadi kebijakan luar negeri, politik luar negeri, dan akan berubah menjadi politik internasional suatu negara sebagai tindakan finalnya.

Sebelum lebih jauh membahas teori – teori hubungan internasional maka penulis terlebih dahulu menyuguhkan teori dasar dari ilmu hubungan internasional yaitu teori politik. Karena pada dasarnya ilmu politik merupakan hal yang melekat pada studi hubungan internasional, pada dasarnya interaksi negara-negara tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dan kekuasaan. Menurut Hans.J.Morgenthau, seorang ahli penganut realis, **politik** yaitu :

**“Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atas manusia, dan apapun tujuan akhirnya, kekuasaan adalah tujuan terpentingnya, dan cara-cara memperoleh, memelihara dan menunjukkan kekuasaannya menentukan teknik tindakan politik”**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif **realisme**. Perspektif realisme dalam politik internasional yang dibawa oleh Morgenthau sebagai pengenalan terhadap studi politik internasional terdiri atas beberapa hal; pertama, human nature, Morgenthau berpendapat bahwa human nature merupakan sifat yang ada di dalam diri manusia. Sifat self-centered, self-regarding, dan self-interested yang merupakan salah satu dari beberapa human nature yang dimaksud, dimiliki oleh setiap manusia sejak dulu dan sampai saat ini masih ada pada setiap diri individu.Sifat dari tiap individu tersebut juga dapat direfleksikan oleh sifat suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Bila diamati hubungan yang terjadi antarnegara saat ini dapat dilihat bahwa dalam setiap interaksinya negara memiliki sifat self-centered, self-regarding, dan self-interested. Hal ini juga berkaitan erat dengan salah satu sudut pandang realisme dalam politik internasional yang dibawa oleh Morgenthau yakni; *National Interest*, Morgenthau mengartikan national interest sebagai *power*. *Power* selanjutnya didefinisikan oleh Morgenthau tidak hanya sebagai sasaran melainkan juga sebagai tujuan.

**Studi Politik Internasional** berfokus pada pola dan tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai bentuk dari sebuah aksi, reaksi, respon, dan sikap suatu negara atas negara lainnya. Objek yang menjadi kajian dari studi politik internasional adalah kepentingan dan unsur *power*. Analisis mengenai tindakan terhadap lingkungan eksternal serta berbagai kondisi domestik yang menopang formulasi tindakan merupakan kajian dari politik luar negeri, dan akan menjadi kajian politik internasional apabila tindakan tersebut dipandang sebagai salah satu pola tindakan suatu negara serta reaksi atau respon oleh negara lain.

Menurut **Mochtar Kusumaatmadja** bahwa : **“Politik internasional pada hakekatnya alat suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri merupakan aspek cita-cita suatu bangsa dan oleh karenanya, politik luar negeri merupakan aspek dari strategi nasional beserta sasaran jangka pendek dan jangka panjang.”**(Kusumaatmadja, 1983)

Intervensi yang dilakukan oleh AS dalam kasus Venezuela yang di definisikan sebagai pelestarian demokrasi sebagai tujuan menyeluruhnya. Pemerintah AS memajukan kepentingan nasionalnya diatas segala-galanya, termasuk melindungi demokrasi setengah bulat, menjaga stabilitas dan keamanan regional, dan mencegah bencana kemanusiaan di Venezuela. Cara terbaik untuk mencapai kepentingan nasional nya di Venezuela melalui kebijakan luar negeri yang dikeluarkan guna memulihkan lembaga-lembaga demokrasi dan aturan hukum di Venezuela. Selain itu, AS juga merupakan salah satu negara yang paling keras dalam dalam membela hak asasi warga negara Venezuela. Apapun motifnya, Amerika Serikat tetap retoris berkomitmen untuk mendemokratisasi Venezuela. Namun Venezuela juga tetap akan mempertahankan ideologi Sosialis Bolivariannya, dimana pemerintahan ini membuat sebuah Organisasi gerakan rakyat yang menentang kebijakan kapitalisme di kawasan Amerika Latin, dan menerapkan sebuah kebijakan ekonomi yang anti terhadap neoliberalisme khususnya di Venezuela yang disebut dengan Lingkaran Bolivarian. Hal ini yang akan memperkuat persepsi bersejarah Amerika Serikat sebagai intervensionis di wilayah Venezuela. Perlawanan, saling berargumentasi dan data yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak merupakan cerminan dari kedua negara yang sama-sama ingin melindungi kepentingan nasionalnya terhadap suatu pemerintahan negara.

**Politik luar negeri** merupakan arah kebijakan suatu negara dan proses sebuah negara dalam memperjuangkan kepentingannya didalam hubungannya dengan negara lain. Politik luar negeri AS dan kepentingannya di Venezuela menimbulkan konflik daripada manfaatnya. menurut **K. J Holsti** politik luar negeri merupakan :

**“Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap negara lain untuk mempengaruhi orientasi, melaksanakan peranan dan untuk mencapai dan mempertahankan tujuan tersebut.”** (Holsti, 1987)

Sedangkan menurut **Carlton Clymer Rodee et al.** mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai:

**“Pola perilaku yang diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungannya dengan negara lain … [yaitu] bagaimana cara menentukan tujuan, menyusun prioritas, menggerakkan mesin pengambilan keputusan pemerintah, dan mengelola sumber daya manusia dan alam untuk bersaing dengan negara lain di dalam lapangan internasional.”**

**Rosenau** berpendapat bahwa setidaknya ada tiga unsur mengapa suatu negara membuat suatu kebijakan luar negerinya, yaitu: (1) kebijakan luar negeri merupakan seperangkat prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan luar negeri suatu negara, (2) kebijakan luar negeri sebagai komitmen dan rencana yang berguna sebagai pedoman pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lainnya di dunia internasional, (3) kebijakan luar negeri merupakan suatu perwujudan kepentingan nasional dengan menggunakan sumber daya dalam negerinya guna mencapai tujuan yang direncanakan (Rosenau, 1976: 16).

Amerika Serikat yang agresif ingin menguasai sektor minyak Venezuela dengan memprivatisasi perusahaan minyaknya di Venezuela, serta sikap Venezuela yang secara aktif menolak perluasan pengaruh AS di wilayahnya dengan melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan milik AS yang ada di Venezuela. Hal ini dilakukan karena berdampak terhadap semakin terpuruknya perekonomian Venezuela akibat adanya privatisasi dari pemilik modal, AS. Kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua negara dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-hak negaranya merupakan salah satu wujud dari implementasi kepentingan nasional kedua negara.

Konsep kepentingan nasional merupakan dasar dalam memahami perilaku internasional suatu negara. Kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan power negara sebagai tujuan maupun instrumen, khususnya yang bersifat destruktif *(hard power)*. Kepentingan juga didasari akan suatu *‘power’* yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara. Pemikiran dan asumsi ini mengendalikan pemikiran dari sebagian teoritisi HI realis, baik dimasa silam maupun masa mendatang.

Seperti yang dipaparkan oleh Kindleberger mengenai kepentingan nasional:

**“…hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (comparative advantage) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasional…”**(Charles. P. Kindlerberger, 2011)

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari domografi, karekter, budaya, bahkan history yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keungulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral kesemua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh Hans J. Morgenthau bahwa kepentingan nasional merupakan;

**“Kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan suatu kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik.”**(Theodore A. Coulumbis and James H. Walfe.)

Konsep kepentingan nasional bagi **Hans J. Morgenthau** memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan.(Charles. P. Kindlerberger, 2011) Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.

Dalam mewujudkan dan memenuhi kepentingan nasionalnya, negara akan menetapkan kedalam kebijakan luar negeri-nya agar kepentingan nasionalnya dapat selaras dengan perilaku politiknya dalam lingkungan internasional. Menurut Mark R. Amstutz:

***“explicit and of governmental officials designed to promote national interests beyond a country’s territorial boundries”***

Dalam definisi ini ada tiga tekanan utama yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melawati batas kewilayahan negara.(Aleksius Jemadu, 2008) Dengan demikian semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor lain dari luar batas wilayahnya secara konseptual merupakan bagian dari kepentingan kebijakan luar negeri.(Aleksius Jemadu, 2008) Kebijakan luar negeri juga bisa diartikan sebagai seperangkat rencana dan komitmen yang menjadi pedoman bagi perilaku pemerintah dalam berhubungan dengan aktor-aktor lain di lingkungan eksternal. Akhirnya rencana dan komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam langkah dan tindakan yang nyata berupa mobilisasi sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan suatu efek dalam pencapaian tujuan.(Aleksius Jemadu, 2008)

Tindakan demikian tergantung dari seberapa besar ‘power’ yang dimiliki negara tersebut. Semakin besar “power” maka akan semakin besar pengaruh negara tersebut kepada negara yang bersangkutan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Mengenai definisi dari kata pengaruh tesebut, Jack C. Plano dkk. Dalam bukunya *Kamus Analisa Politik* menyatakan bahwa:

**“Pengaruh adalah kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah-laku orang lain dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Penggunaan pengaruh yang berhasil dapat menyebabkan perubahan-perubahan (atau mencegah perubahan-perubahan yang tidak diinginkan) pada kecenderungan, pendapat, sikap dan keyakinan atau pada tingkah-laku lain yang dapat terlihat. Kemampuan pelaku mempengaruhi orang lain tergantung pada banyak faktor. Di antaranya adalah faktor kekuasaan politik mereka, bentuk dan tingkat pengaruh yang digunakan, cakupan tugas atas dasar wewenang dan pengaruh, kualitas kompetitif dari pihak lain yang juga tengah melancarkan pengaruh dan derajat tuntutan penyesuaian.”**

Kekuasaan adalah hal yang substansial dalam ilmu politik dan ilmu hubungan internasional. Filsuf politik terkemuka seperti **Harold D. Laswel dan Abraham Kaplan** mendefinisikan *power* sebagai berikut : “kekuasaan adalah suatu hubungan seseorang atau kelompok lain kearah tujuan dari pihak pertama” *(power is a relationship in which one person or group is able to determine)*”

Pendapat Harold dan Abraham begitu melekat pada sifat hegemoni AS di dunia. AS sebagai negara hegemoni terbiasa menggunakan powernya untuk mempengaruhi tindakan politik negara lain melalui kebijakan politik luar negerinya. Definisi dasar dari kebijakan menurut **Miriam Budiardjo** dalam bukunya ***Dasar-Dasar Ilmu Politik*** mendefinisikan : “Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu”. Sejalan dengan tindakan politik AS di Venezuela yang agresif. Intervensi yang dilakukan oleh AS terhadap pemerintahan Venezuela mencerminkan teori realisme sebagai suatu pijakan untuk menganalisis kebijakan politik luar negeri AS di Venezuela.

Dikaitkan dengan konsep politik luar negeri AS, menurut **K.J Holsti** politik internasional dalam bukunya yang berjudul ***Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*** yaitu sebagai berikut : “dalam *world politics* atau politik internasional merupakan kajian serupa politik luar negeri. Keduanya menitikberatkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur power negara besar”

Seperti yang dibahas pada paragraf sebelumnya, realisme dalam hubungan internasional adalah teori yang relevan untuk menggambarkan situasi politik, sosial dan keamanan di Venezuela, karena semakin gencarnya AS dalam mengintervensi pemerintahan Venezuela saat ini. Maka harus kita ketahui terlebih dahulu elemen-elemen realisme untuk dapat menganalisis kebijakan politik luar negeri AS di Venezuela berikut asusmsi dasar kaum realis : Realis memandang bahwa power merupakan hal yang krusial. Bagi realis, esensi power adalah kemampuan untuk mengubah perilaku *(behavior)* atau mendominasi. *State power* (kekuatan negara) dapat dipahami dalam tiga tingkatan: (1) sumber daya atau kapabilitas, atau *power-in-being*; (2) bagaimana *power* dikonversi melalui proses nasional; (3) dan *power* dalam bentuk *outcomes*, atau dimana negara *prevails* (menang/berhasil menggunakan pengaruhnya) dalam kondisi tertentu. Titik awal dalam berpikir tentang dan mengukur *national power* adalah dengan memandang state sebagai “*capability containers*.”

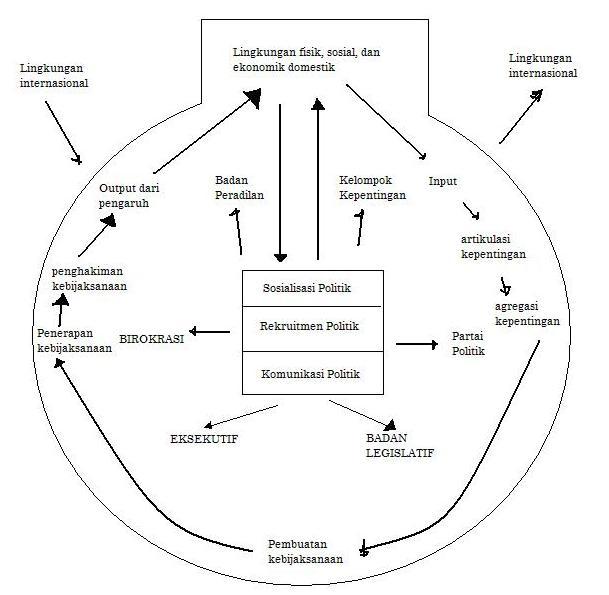
Tiga poin diatas tentunya sangat berguna dalam memahami hubungan asimetris Venezuela yang secara “tradisional” dianggap sebagai *weak state* dengan Amerika Serikat sang super power yang dimaklumi sebagai *strong state*. Dalam hal ini Amerika Serikat merupakan *power* nomor satu, tetapi bukan berarti satu satunya *power*.

Sikap agresif AS dalam melakukan intervensi terhadap pemerintahan Venezuela seolah diperkuat dengan pandangan **Morgentau** mengenai *power* :

**“Jika masyarakat ingin memperoleh suatu wilayah politik yang bebas dari intervensi dan kendali pihak asing, mereka harus mengerahkan kekuatan mereka dan menyebarkan kekuatannya untuk tujuan tersebut. Yaitu mereka harus mengorganisasikan diri mereka sendiri kedalam negara yang kuat dan efektif yang dengan cara itu mereka dapat mempertahankan kepentingannya”**

Seperti konsep ‘pengaruh’ yang sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Amerika Serikat sebagai lingkungan eksternal juga memiliki pengaruh terhadap stabilitas dan sistem politik di Venezuela. Keterlibatan ini yang kemudian mempengaruhi jalannya pemerintahan di Venezuela. Sistem politik, selalu berinteraksi dengan lingkungan yang memengaruhinya maupun yang dipengaruhinya. Sebagai contoh, berbagai macam pengaruh yang berasal dari lingkungannya mengalir masuk ke dalam sistem politik, sebaliknya sistem politik memengaruhi pula lingkungannya. Sebagai contoh, pengaruh lingkungan yang masuk ke dalam sistem politik berupa input – baik berupa tuntutan maupun dukungan, sedangkan hasilnya yang berupa output (keputusan atau kebijaksanaan) berpengaruh pula ke dalam lingkungan masyarakatnya. Berikut gambaran analisis sistem politik menurut Gabriel Almond :

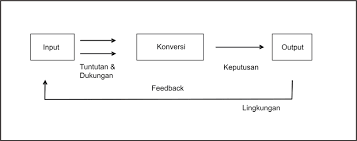
**Gambar 2.1**



Sedangkan menurut David Easton, sistem politik merupakan sistem yang bagian-bagiannya bekerja untuk melakukan pengalokasian nilai, alokasi nilai ini bersifat memaksa dan mengikat seluruh masyarakat. Menurut Easton, pendekatan analisis sistem politik merupakan alat utama untuk mempelajari kehidupan politik suatu negara, terutama sistem politiknya. Easton mengamati kehidupan politik sebagai jalinan interaksi tingkah laku manusia sebagai suatu sistem. Dalam hal ini diterangkan mengenai bagaimana input sistem politik berupa tuntutan (demand), dukungan (supprot) dan yang berasal dari lingkungan sistem politik, berubah menjadi output berupa keputusan ataupun kebijaksanaan, setelah melalui suatu proses konversi. Selanjutnya, diterangkan bagaimana suatu output, setelah melalui mekanisme umpan balik (feedback) ke dalam lingkungannya dapat menghasilkan suatu input baru, baik berupa tuntutan ataupun dukungan terhadap sistem politik.

Berikut gambaran proses bekerjanya suatu sistem politik :

**Gambar 2.2**



Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem politik secara umum adalah *input*, konversi (proses), *output*, *feedback*, dan lingkungan (Easton, 1992: 193-195). Dari gambar diatas dapat dilihat bagaimana sistem politik dapat bekerja. Adanya input berupa tuntutan dan dukungan, kemudian dilanjutkan dengan konversi dan pada akhirnya menjadi *output*, berupa keputusan atau kebijakan. Setelah menjadi *output*, ada umpan balik melalui lingkungan yang kemudian akan kembali lagi mempengaruhi *input*.

Proses politik di Venezuela, Amerika Serikat sebagai lingkungan eksternal yang mana ikut serta mempengaruhi aktivitas politik di Venezuela. Dalam hal ini Venezuela masih berusaha memerangi keikutsertaan AS dalam krisis pemerintahan Venezuela yang terjadi hingga saat ini. AS dianggap melakukan intervensi berupa dukungan kepada pemerintahan oposisi dibawah pimpinan Juan Guaido. Pihak oposisi di dukung penuh oleh pihak AS sebagai lawan untuk meruntuhkan pemerintahan sosialis Maduro. Salah satu sumber konflik politik adalah adanya struktur yang terdiri dari penguasa politik dan sejumlah orang yang dikuasai. Struktur ini menyebabkan bahwa konflik politik yang utama adalah para penguasa politik dan sejumlah orang yang menjadi obyek kekuasaan politik. Konflik yang hebat antara penguasa politik dengan rakyatnya sendiri karena ketidakmauan dan ketidakmampuan penguasa politik memahami dan membela kepentingan rakyatnya. Rakyat tidaklah patut disalahkan sebagai penyebab terjadinya konflik politik.

Adanya pihak oposisi tersebut memunculkan beberapa gerakan politik oleh para demonstran *(collectivos)* dengan tujuan agar Maduro segera mengatasi krisis bekepanjangan yang terjadi atau turun dari jabatannya. Selama demonstrasi berlangsung, konflik lainnya pun sering kali terjadi, yaitu gesekan antara pendukung pemerintahan sayap kiri dan sayap kanan. Perlu diperhatikan, konflik politik ditimbulkan oleh adanya keterbatasan sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk hidup semakin besar kemungkinan terjadinya konflik politik. Dengan kata lain,semakin besar penderitaan dan kekecewaan rakyat semakin besar dorongan di dalam masyarakat untuk terlibat konflik dengan penguasa politik.(Cholisin and Nasiwan, 2012) Kondisi pemerintahan negara dengan pergantian kekuasaan yang dilalui lewat cara kudeta serta diiringi dengan perilaku elit politik negara yang cenderung otoriter. Konflik ini pun semakin berkembang menjadi konflik sosial yang muncul akibat pemerintah yang tidak mampu mengatasi permasalahan politik yang terjadi, dimana Venezuela disebut negara dengan ‘dua matahari’ yang berarti dipimpin oleh dua presiden yang saling mengklaim atas kekuasaan. Sehingga rakyat tidak mempunyai pegangan dan menyebabkan konflik sosial yang didalamnya terdapat konflik kemanusiaan dan krisis ekonomi.

**Robert M. Z Lawang**, mendefinisikan pengertian konflik sebagai berikut:

**“Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukan pesaingnya. Konflik juga dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial, dan budaya) yang relatif terbatas.”** (Lawang, 1994)

Konflik merupakan benturan antara kekuatan dan kepentingan, dan kepentingan muncul dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan suatu negara muncul dari berbagai kondisi baik itu kondisi politik, ekonomi, militer, dan sosial budaya.

Dalam kehidupan bernegara, konflik merupakan suatu hal yang akan sulit untuk dihindari. Permasalahan yang akan menimbulkan konflik tersebut dapat terjadi ditingkat lokal sampai tingkat internasional, Peter Wallensteen dalam Jemadus lewat bukunya Understanding Conflict Resolution: War, Peace and The Global System menyebutkan ada tiga tipe konflik internasional, yaitu; (1) konflik antar negara *(interstate conflict)*, (2) Konflik Internal *(internal conflict)*, dan (3) Konflik yang berkaitan dengan pembentukan negara *(state formation conflict)*.

Krisis yang terjadi di Venezuela termasuk ke dalam konflik internal *(internal conflict).* Dari konflik politik hingga konflik sosial yang melibatkanpemerintah dan rakyat. Konflik sosial meliputi perang, revolusi, kudeta, gerilyawan, sabotase, teror, huru hara, demonstrasi dan lain sebagainya. Krisis sistem politik di Venezuela mengakibatkan adanya konflik sosial yang cukup kompleks, mulai dari kudeta, kondisi perekonomian yang sangat terpuruk, krisis kemanusiaan, hingga gerakan politik secara besar besaran oleh para demonstran demi tuntutan perubahan. Adapun definisi gerakan politik sebagai berikut :

**“Gerakan politik gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Gerakan politik dapat berkisar disekitar satu masalah atau dari serangkaian isu permasalahan atau sekitar timbunan keprihatinan bersama dari sekelompok sosial. Berbeda dengan partai politik, gerakan politik tidak terorganisir dan tidak memiliki keanggotaan, bukan pula gerakan pada saat pemilu atas jabatan politik pada kantor-kantor pemerintah akan tetapi lebih merupakan gerakan politik yang berdasarkan kesamaan dalam kesatuan pandangan politik untuk tujuan tertentu antara lain untuk meyakinkan atau menyadarkan politik atau masyarakat termasuk pula para pejabat pemerintahan untuk mengambil tindakan pada persoalan dan masalah yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut”.**

Berdasarkan paparan konseptual di atas, maka penulis mencoba untuk membuat konklusi untuk mendukung dan mengarahkan kepada hipotesis, penulis mencoba untuk menguraikan dan mengemukakan beberapa asumsi, antara lain :

1. Lingkungan eksternal terdiri dari negara adidaya Amerika Serikat yang mempunyai kepentingan, baik itu kepentingan ekonomi berupa sektor minyak, maupun kepentingan ideologi, dimana Amerika Serikat sebagai negara yang agresif dalam mencapai kepentingannya di negara-negara Amerika Latin, hingga saat ini masih berusaha memberikan pengaruh ideologinya terhadap sistem pemerintahan di Venezuela. AS di duga sebagai penyebab awal terjadinya konflik politik yang terjadi di Venezuela hingga saat ini, dimana AS membuat Venezuela merubah kebijakan ekonomi politiknya yang semata-mata bertujuan demi kepentingan AS sendiri. Agresifitas keterlibatan AS untuk mendemokratisasi pemerintahan Venezuela saat ini memperburuk situasi politik Venezuela, dengan mendukung upaya kudeta Venezuela yang dilakukan oleh Juan Guaido untuk menggulingkan pemerintahan Nicolas Maduro.
2. Suatu negara dikatakan stabil sistem politiknya apabila pemerintah dan masyarakat bersama-sama aktif dalam kegiatan politik di negaranya, dan tidak adanya campur tangan dari lingkungan eksternal dan pengaruhnya terhadap stabilitas politik dan keamanan negara.
3. Krisis sistem politik di Venezuela berkembang menjadi konflik sosial yang cukup kompleks, terjadinya upaya kudeta, kondisi perekonomian yang sangat terpuruk, krisis kemanusiaan, hingga gerakan politik secara besar besaran oleh para demonstran demi tuntutan perubahan struktur sosial politik di Venezuela.

**2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan teori-teori dan berbagai asumsi dalam kerangka teoritis diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis penelitian sebagai dugaan atau asumsi serta merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

**“Jika reaksi dan sikap berupa dukungan serta tuntutan merupakan pola dari kebijakan luar negeri AS maka intensitas ketegangan serta faksi yang bertikai menimbulkan potensi kerusuhan serta kekerasan yang menimbulkan krisis sistem politik di Venezuela ”**

**2.4** **Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep, Teoritik, Empiris dan Analisis)**

Untuk membantu dalam menganalisa penelitian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi Operasional Variabel tentang konsep hipotesis, yaitu :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(Empirik)** | **Variabel**  **(Analisis)** |
| **Variabel bebas :**  Jika reaksi dan sikap berupa dukungan serta tuntutan merupakan pola dari orientasi politik luar negeri AS  **Variabel terikat:**  maka intensitas ketegangan serta faksi yang bertikai menimbulkan potensi kerusuhan serta kekerasan yang menimbulkan krisis sistem politik di Venezuela | 1. Dukungan dan tuntutan oleh Amerika Serikat 2. Orientasi Politik Luar Negeri AS 3. Ketegangan Faksi Yang Bertikai Di Venezuela 4. Kerusuhan dan Kekerasan di Venezuela 5. Krisis Sistem Politik di Venezuela | 1. Data mengenai dukungan dan tuntutan AS terhadap krisis sistem politik di Venezuela   https://www.voaindonesia.com/a/trump-dukung-pemimpin-oposisi-untuk-pulihkan-demokrasi-di-venezuela/4765970.html   1. Data mengenai pola kebijakan luar negeri AS terhadap Venezuela   http://www.cries.org/wp-content/uploads/2018/09/012-CamilleriEdit.pdf   1. Data mengenai Intensitas ketegangan faksi yang bertikai di Venezuela   https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190508104443-134-392952/venezuela-usut-politikus-oposisi-terlibat-upaya-kudeta-1-mei   1. Data mengenai kerusuhan dan kekerasan yang terjadi di Venezuela   https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190502133858-134-391362/puluhan-warga-venezuela-terluka-saat-bentrok-dengan-aparat   1. Data mengenai krisis sistem politik di Venezuela   https://edition.cnn.com/2019/01/24/americas/venezuela-crisis-maduro-guaido-explained/index.html |

**Tabel 2.2 : Operasional Variabel dan Indikator**

* 1. **Skema dan Alur Penelitian**

**Gambar 2.3**

**Skema Kerangka Pemikiran**

**TRANSISI PEMBANGUNAN SISTEM POLITIK DI VENEZUELA**

Hubungan Internasional

Kebijakan Politik Pemerintahan Venezuela

VENEZUELA

Politik Internasional

Pengaruh Amerika Serikat

Sistem Politik Presidensial

Kepentingan Nasional

Krisis Sistem Politik/Konflik Politik

Kebijakan Luar Negeri